

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Atmadja, Asikin Kusuma. 1992. *Pemberantasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan: Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan ketentuan Hukum Acara*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.
- Cserne, Peter. 2014. *Freedom of Contract and Economic Analysis: Encyclopedia of Law and Economics*. Hull City: University of Hull.
- Daadoush, Ghazal. 2025. *The Contractual Practice and Legal Framework Applicable to Investor-States Contracts, Critical Discussion of the Quotes: The Principle of Sanctity of Contracts (Pacta Sunt Servanda) as the Leading Maxim of Contract Law Generally has Priority over Changes in the Surrounding Economic Condition*. Salford: University of Salford.
- Dunne, Van. 1987. *Diktat Kursus Hukum Perikatan III - Terjemahan Sudikno Mertokusumo*. Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2020. *Pra-kontraktual dalam Hukum Perdata Indonesia: Suatu Telaah Kritis dan Solusi*. Jakarta: Alungdan Mandiri.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Indroharto. 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara -Buku 1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jonaedi, dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kamarullah, 2008, *Keputusan Tata Usaha yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*. Pontianak: UNTAN Press.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Penerbit Prendada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Libert.
- Miru, Ahmadi. 2000. *Hukum Perdata Materiil dan Formil*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan.
- Panggabean, Henry Pantas. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Mandar Maju.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada.
- Satrio, Juswito. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2022. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2006. *Buku Ajar: Teknik Perancangan Kontrak*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- . 2021. *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sriwidodo, Joko. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press..
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1954. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

Tjandra, Riawan. 2022. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.

Waddams, Stephen. 2019. *Sanctity of Contracts in a Secular Age: Equity, Fairness, and Enrichment*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wibowo, Richo Andi. 2021. *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*. Jakarta: Kencana.

Widjaja, Gunawan. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zamroni, Muhammad. 2020. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Surabaya: Scopindo.

II. Artikel Jurnal

Atmadja, Asikin Kusuma. 1987. "Pembatasan Rentenisi Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan." *Varia Peradilan*. Vol 2. No. 27 17.

Clarins, Sharon. 2022. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia." *Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2 hlm. 537-552.

Dengah, Kartika. 2015. "Eksistensi serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka pada Hukum Perikatan." *Lex Privatum*. Vol. 3. No. 4. hlm. 143-149.

Friedman, Lawrence. 1969, "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review*, Vol. 4, hlm. 29-44.

Harissa, Teguh. 2018. "Penerapan Asas Proporsionalitas bagi Hakim dalam Mengadili Sengketa Kontrak." *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 2. hlm. 78 - 90.

Hernoko, Agus Yudha. Vol. 12, No. 3, 2007. "Azas Proporsionalitas sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak." *Perspektif*. hlm. 221 - 244.

Judanto, Muhammad Dhimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. "Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandigheden dan Undue Influence dalam Kaitannya dengan Pembentukan Klausula Baku untuk Kredit perbankan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6. No. 3. hlm. 10388-10396.

Juliani, Henny. 2018. "Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1. No. 3. hlm. 47-61.

Manan, Bagir. 1996. "Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah." *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*. Vol, 14. No, 3. hlm. 27-29.

P., Atwinda P. Y., Rahayu H. M., and Kabul Supriyadhie. 2016. "Analisa Hukum Terhadap Pengecualian Pelanggaran Berat HJAM Terkait dengan Imunitas Negara dalam Kasus Luigi Ferrini (Jerman Vs. Italia, Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2012)." *Diponegoro Law Review*. hlm. 1-12.

Pane, Musa Darwin. 2017. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2. hlm. 147-155.

Rahmawan, Muhammad Iqbal. 2019. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian." *Notarius*, Vol. 12, No. 2. hlm. 909-923.

Ridwan, F.H., R. Agustina, dan J. Rizal, 2017, "Does Sanctity of Contract Exist in Oil and Gas Contracts in Indonesia, *Law and Justice in a Globalized World*

Sinaga, Paulus Rudy Calvin, and Anna Erliyana. 2022. "Relevansi Teori *Oplossing* dalam Penanganan Sengketa Terkait Keputusan Pengadaan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, hlm. 432-455.

Sugianto, Aris, Ahda Sabila, and Muanifah Athiyyah . 2024. "Tata Kelola Perguruan Tinggi di Indonesia." *Stratego: Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 6, No. 3, hlm. 89-101.

Wicaksono, Dian Agung, Dedy Kurniawan, and Bimo Fajar Hantoro. 2020. "Diskursus Kompetensi Absolut PTUN dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Rechtvinding*. hlm. 367-386.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola

Putusan Mahkamah Agung Nomor 252.K/TUN/2000

Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3667/UN57/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2025

Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 1379/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 12/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

SOP Nomor 16/UN57.L.1/OT.02.00/2023 tentang SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

SOP Nomor 19/UN57.1.1/OT. 02100/2023 tentang SOP Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Dana Internal

IV. Internet

Solehudin, 2022, *Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/> diakses pada 29 Juli 2025.

V. Lain-Lain

Surat FKIP Universitas Tidar Nomor B/908/UN.57.F3/DT.06.01/2023 Tertanggal 26 Mei 2023 Perihal Revisi Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Akumulasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor T/557/UN57/KP.16/2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi